DARI ORDE BARU HINGGA KINI: PEMBANGUNAN SEBAGAI SUMBER LEGITIMASI POLITIK DI INDONESIA

Azizah Rifdatul Srinabila[1], Siti Fatimah[2], Rusdi[3]

[1,2,3]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : azizahrifdatulsn@gmail.com

ABSTRACT

Development has been an important instrument used by the Indonesian government to gain political support from the New Order era to the present. During the New Order period, development achievements became the basis for securing public support. Although Indonesia has entered the more democratic Reform Era, successive post-New Order governments have continued to use development as a source of political legitimacy. However, studies examining the continuity of the development paradigm as a tool of political legitimacy from the New Order to the contemporary era remain limited. This study aims to analyze the continuity of the development paradigm as a source of political legitimacy in Indonesia from the New Order period to the present. The research employs a qualitative approach using a literature study method. Data were collected through the analysis of books, academic journals, government documents, news articles, and previous studies. The findings show that despite the transition from an authoritarian to a democratic political system, development remains an important instrument for building and maintaining government legitimacy. The difference lies in how development is communicated to the public. During the New Order era, development was directed toward supporting political stability and state power, whereas in the Reform Era it has been framed as government performance to gain public support through democratic mechanisms. Therefore, the development paradigm has continued to serve as a source of political legitimacy, although its forms and implementation strategies have adapted to changes in Indonesia's political context.

Keywords : *New Order, Development, Political Legitimacy, Government, Contemporary Indonesia.*

ABSTRAK

Pembangunan menjadi alat penting yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan dukungan politik sejak masa Orde Baru hingga hari ini. Pada masa Orde Baru, pencapaian dalam pembangunan digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Meskipun Indonesia sudah memasuki masa Reformasi yang lebih demokratis, berbagai pemerintahan setelah Orde Baru masih cenderung menggunakan pembangunan sebagai dasar untuk mendapatkan legitimasi politik. Namun, penelitian tentang terus berlangsungnya paradigma pembangunan sebagai alat legitimasi politik dari masa Orde Baru hingga era sekarang masih belum banyak. Penelitian ini ingin mengeksplorasi bagaimana pandangan tentang pembangunan yang berkelanjutan menjadi dasar sahnya pemerintah Indonesia, mulai dari masa Orde Baru hingga masa kini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mempelajari dan menganalisis berbagai sumber dokumentasi yang relevan. Data didapat dari pengamatan terhadap buku, jurnal ilmiah, dokumen pemerintah, artikel berita, serta hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem politik mengalami perubahan dari otoritarianisme ke demokrasi, pembangunan masih menjadi alat penting dalam membangun dan menjaga kredibilitas pemerintah. Perbedaannya ada di bagaimana cara pembangunan disampaikan kepada masyarakat. Pada masa Orde Baru, pembangunan dilakukan agar bisa mendukung kestabilan politik dan kekuasaan pemerintah, sedangkan pada masa Reformasi, pembangunan disusun sebagai cara menunjukkan hasil kerja pemerintah untuk memperoleh dukungan dari masyarakat melalui cara yang demokratis. Dengan demikian, terdapat hubungan yang terus-menerus antara paradigma pembangunan sebagai sumber legitimasi politik, meskipun bentuk dan cara penerapannya disesuaikan dengan perubahan situasi politik di Indonesia.

Kata Kunci : *Orde Baru, Pembangunan, Legitimasi Politik, Pemerintahan, Indonesia Kontemporer.*

PENDAHULUAN

Sejak awal kemerdekaannya, pembangunan nasional telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan masyarakat yang adil dan sejahtera, seperti yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep pembangunan tidak hanya dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat negara dan menciptakan stabilitas nasional. Oleh karena itu, setiap pemerintahan di Indonesia menjadikan pembangunan sebagai agenda prioritas dalam menjalankan pemerintahannya(Aman, 2015). Pentingnya pembangunan semakin terlihat pada masa Orde Baru (1966–1998) di bawah kepemimpinan Soeharto. Pada awal kepemimpinannya, Orde Baru menghadapi berbagai tantangan ekonomi, seperti inflasi tinggi dan ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh krisis pada akhir pemerintahan sebelumnya. Untuk mengatasi situasi tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang berhasil menurunkan inflasi dan mendorong pemulihan perekonomian nasional (Mayrudin, 2018). Kesuksesan ini kemudian menjadi landasan bagi pemerintah untuk membangun citra sebagai rezim yang mampu memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan pada periode Orde Baru didasarkan pada konsep Trilogi Pembangunan, yang mencakup pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Konsep ini diwujudkan melalui berbagai program, salah satunya adalah Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), yang menjadi acuan untuk pembangunan nasional selama Orde Baru. Dengan berbagai keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur, pemerintah tidak hanya berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap kekuasaan yang ada(Hadiz, 2018). Meskipun sistem politik Indonesia telah mengalami perubahan besar sejak Reformasi 1998, pembangunan masih tetap menjadi agenda pokok dalam pemerintahan Indonesia. Berbagai program pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi terus dijadikan ukuran keberhasilan pemerintah. Bahkan, pencapaian pembangunan sering disampaikan kepada masyarakat sebagai bukti kinerja pemerintah dan sebagai landasan untuk mendapatkan dukungan politik(Hot Raja & Ekayanta, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan publik, tetapi juga sebagai alat untuk legitimasi politik. Fenomena ini menjadi isu penting untuk diteliti karena menunjukkan kemungkinan keberlanjutan paradigma pembangunan yang telah ada sejak era Orde Baru hingga Indonesia saat ini. Meskipun sistem politik Indonesia telah menjadi lebih demokratis, berbagai kelompok elite ekonomi dan politik tetap memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam konteks tersebut, pembangunan sering menjadi arena yang mempertemukan kepentingan negara, elite politik, dan kelompok ekonomi dalam mempertahankan dukungan publik terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa (Robison & Hadiz, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pembangunan dipakai sebagai sumber legitimasi politik pemerintah Indonesia dari masa Orde Baru hingga saat ini, serta bagaimana kesinambungan dan perubahan paradigma tersebut terjadi dalam konteks politik yang berbeda.

Peneliti beranggapan bahwa pembangunan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi juga berfungsi sebagai alat bagi pemerintah untuk mendapatkan dan menjaga legitimasi politik. Meskipun Indonesia telah beralih dari pemerintahan Orde Baru yang bersifat otoriter ke sistem politik yang lebih demokratis selama masa Reformasi, pembangunan tetap menjadi indikator utama yang digunakan oleh pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan

mereka kepada masyarakat. Kondisi ini mencerminkan adanya kesinambungan paradigma pembangunan yang telah ada sejak era Orde Baru. Pandangan ini sejalan dengan teori legitimasi politik yang diungkapkan oleh Max Weber, yang menjelaskan bahwa legitimasi adalah pengakuan dari masyarakat mengenai hak pemerintah untuk menggunakan kekuasaan(Weber, 1978). Dalam konteks negara modern, legitimasi tidak hanya diperoleh dari proses hukum atau pemilihan umum, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan dapat menjadi salah satu sumber legitimasi politik bagi pemerintah. Selain itu, konsep hegemoni yang dijelaskan oleh Antonio Gramsci juga menunjukkan bahwa kekuasaan dapat dipertahankan melalui penciptaan dukungan masyarakat terhadap nilai dan kebijakan yang ditetapkan oleh negara (Gramsci, 1971). Di Indonesia, pembangunan sering kali ditampilkan sebagai tanda keberhasilan pemerintah, yang dapat membangun dukungan publik terhadap pemimpin. Oleh karena itu, peneliti merasa bahwa penting untuk menyelidiki bagaimana pembangunan digunakan sebagai sumber legitimasi politik dari era Orde Baru hingga saat ini, serta mengeksplorasi sejauh mana pola tersebut mengalami perubahan atau keberlanjutan dalam sistem politik Indonesia saat ini.

Kajian Teoritis

Penelitian mengenai pembangunan pada masa Orde Baru telah dilakukan oleh Rahmawati (2022) dalam artikel *Repelita: Sejarah Pembangunan Nasional di Era Orde Baru*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa program Repelita menjadi instrumen utama pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan konsep Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Fokus penelitian ini adalah pada sejarah pelaksanaan pembangunan dan dinamika kebijakan pembangunan selama era Orde Baru(Rahmawati, 2022).

Rajab (2022) dalam penelitian *Otoritarianisme-Birokratik Orde Baru, Krisis Ekonomi dan Politik, dan Demokrasi Formal Masa Reformasi* menunjukkan bahwa keberhasilan Orde Baru dalam menekan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor yang memperkuat stabilitas pemerintahan. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada hubungan antara sistem politik otoritarian, pembangunan ekonomi, dan transisi menuju era Reformasi(Rajab, 2022).

Penelitian lain oleh Subari dan Hidayati (2023) berjudul *Sipil dan Militer: Legitimasi Kekuasaan dalam Pusaran Demokratisasi di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966–1998)* membahas bagaimana legitimasi kekuasaan Orde Baru dibangun melalui dominasi negara, peran militer, serta pengendalian kehidupan politik masyarakat. Penelitian ini berfokus pada aspek legitimasi kekuasaan dan hubungan sipi l-militer selama pemerintahan Orde Baru(Subari & Hidayati, 2023).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada pembangunan Orde Baru, legitimasi kekuasaan Orde Baru, atau dinamika politik pasca-Reformasi secara terpisah. Hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang secara khusus menghubungkan pembangunan sebagai sumber legitimasi politik serta menelusuri keberlanjutan paradigma pembangunan dari masa Orde Baru hingga pemerintahan Indonesia kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana pembangunan digunakan sebagai sumber legitimasi politik sejak era Orde Baru hingga saat ini, serta melihat kesinambungan dan perubahan pola legitimasi politik dalam konteks sistem politik yang berbeda. Berdasarkan penjelasan tentang latar belakang, respons peneliti, dan celah dalam penelitian yang telah diuraikan, studi ini menitikberatkan pada

keberlanjutan paradigma pembangunan sebagai alat legitimasi politik bagi pemerintah Indonesia dari masa Orde Baru sampai saat ini. Penelitian ini meneliti bagaimana pembangunan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, serta bagaimana perubahan sistem politik dari otoriter ke demokrasi memengaruhi pemanfaatan pembangunan sebagai alat legitimasi politik. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis peran pembangunan sebagai alat legitimasi politik bagi pemerintah Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang. Secara spesifik, studi ini berfokus pada identifikasi cara-cara pembangunan digunakan untuk mendapatkan legitimasi politik, menggambarkan kesinambungan dan perubahan paradigma pembangunan antara masa Orde Baru dan Reformasi, serta mengevaluasi relevansi pembangunan sebagai alat legitimasi politik dalam konteks Indonesia modern.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research)(Sugiyono, 2022). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan secara mendalam bagaimana pembangunan digunakan sebagai sumber legitimasi politik pemerintah Indonesia dari era Orde Baru hingga masa kontemporer(Moleong, 2018). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis berbagai konsep, kebijakan, dan fenomena politik berdasarkan sumber-sumber tertulis yang relevan.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif-kualitatif. Desain tersebut digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan antara pembangunan dan legitimasi politik dalam konteks sejarah politik Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan pembangunan nasional, legitimasi politik, pemerintahan Orde Baru, serta perkembangan politik Indonesia pada era Reformasi. Analisis dilakukan secara komparatif untuk melihat kesinambungan dan perubahan paradigma pembangunan sebagai sumber legitimasi politik dari masa Orde Baru hingga saat ini.

Partisipan dan Teknik Sampling

Karena penelitian ini menggunakan metode studi literatur, penelitian tidak melibatkan partisipan secara langsung. Sumber data penelitian berupa dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen pemerintah, serta sumber sejarah yang membahas pembangunan dan legitimasi politik di Indonesia. Pemilihan sumber dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian, khususnya mengenai pembangunan pada masa Orde Baru, legitimasi politik, dan dinamika politik Indonesia kontemporer.

Instrumen dan Pengumpulan Data

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan dalam mengidentifikasi, memilih, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai sumber data yang relevan. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen pemerintah, laporan resmi, serta sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan pembangunan dan legitimasi politik di Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti mengidentifikasi literatur yang relevan dengan tema penelitian melalui database jurnal,

perpustakaan digital, dan dokumen resmi pemerintah. Kedua, peneliti melakukan seleksi sumber berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Ketiga, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti pembangunan pada era Orde Baru, konsep legitimasi politik, serta keberlanjutan paradigma pembangunan pada era Reformasi hingga masa kontemporer. Selanjutnya, data yang telah terkumpul didokumentasikan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan pendekatan analisis data kualitatif menggunakan metode analisis isi. Proses analisis dilakukan dengan mengkaji dan menafsirkan berbagai sumber literatur untuk mengidentifikasi pola, tema, serta keterkaitan antara pembangunan dan legitimasi politik dalam kerangka sejarah politik di Indonesia. Proses analisis data terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana yang dinyatakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman(Miles et al., 2014). Pada tahap reduksi data, peneliti memilah dan memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif guna mempermudah pemahaman mengenai fenomena yang diteliti. Tahap akhir mencakup penarikan kesimpulan melalui penafsiran terhadap temuan yang ada untuk menjelaskan kesinambungan pembangunan sebagai dasar legitimasi politik dari era Orde Baru sampai Indonesia saat ini. Pendekatan analisis ini dipilih karena sejalan dengan tujuan penelitian yang berusaha memahami makna, pola, serta kesinambungan suatu fenomena politi k dari sudut pandang historis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembangunan sebagai Dasar Legitimasi Politik pada Masa Orde Baru

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan berperan sebagai salah satu alat utama yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk mendapatkan dan menjaga legitimasi politik. Ketika Orde Baru mengambil alih kekuasaan pada pertengahan 1960-an, Indonesia mengalami kondisi ekonomi yang tidak stabil. Tingginya inflasi, rendahnya tingkat produktivitas ekonomi, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh rezim baru ini. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru menjadikan pembangunan ekonomi sebagai fokus utama dari agenda kerjanya(Aman, 2015).

Untuk mencapai pembangunan nasional, pemerintah Orde Baru memperkenalkan konsep Trilogi Pembangunan yang terdiri dari stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Ketiga elemen ini dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan negara selama lebih dari tiga puluh tahun di bawah pemerintahan Soeharto. Stabilitas politik dianggap sebagai prasyarat utama untuk melaksanakan pembangunan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan dipandang sebagai indikasi keberhasilan pemerintah(Rahmawati, 2022).

Penerapan Trilogi Pembangunan direalisasikan melalui program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Program ini menjadi acuan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap dari Repelita I hingga Repelita VI. Melalui program ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan produksi pertanian, memperluas pembangunan infrastruktur, mendorong industrialisasi, serta memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan(Rahmawati, 2022). Salah satu keberhasilan yang sering dinyatakan pemerintah adalah pencapaian swasembada beras pada tahun 1984 yang mendapatkan pengakuan di tingkat internasional. Beragam prestasi dalam

pembangunan itu menjadi aset politik yang sangat berharga bagi pemerintah Orde Baru (Ricklefs, 2021). Pembangunan diartikan tidak hanya sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melainkan juga untuk menciptakan citra bahwa pemerintah merupakan aktor utama yang dapat membawa kemajuan bagi bangsa. Dengan kata lain, keberhasilan dalam pembangunan berfungsi sebagai sumber legitimasi politik yang memperkuat posisi pemerintah di mata masyarakat.

Hubungan Pembangunan dan Legitimasi Politik pada Masa Orde Baru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi politik di era Orde Baru tidak hanya diperoleh melalui cara formal dalam kenegaraan, tetapi juga melalui keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan yang dipamerkan kepada masyarakat. Pemerintah secara aktif mempromosikan berbagai hasil pembangunan melalui media massa, pidato resmi, buku teks, dan berbagai bentuk komunikasi politik lainnya. Pembangunan kemudian menjadi narasi utama yang digunakan untuk membangun dukungan masyarakat bagi pemerintah. Dalam berbagai dokumen resmi negara, keberhasilan pembangunan sering kali dihubungkan dengan keberhasilan kepemimpinan nasional. Keadaan ini menciptakan pandangan bahwa stabilitas politik dan perkembangan ekonomi hanya bisa tercapai jika masyarakat mendukung pemerintah yang sedang berkuasa(Heryanto, 2019).

Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan di masa Orde Baru memiliki dua fungsi. Di satu sisi, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi di sisi lain, juga berfungsi sebagai alat politik untuk menguatkan legitimasi kekuasaan negara. Oleh karena itu, pembangunan dan kekuasaan menjadi dua aspek yang saling terkait dalam praktik pemerintahan Orde Baru(Subari & Hidayati, 2023). Analisis ini sejalan dengan teori legitimasi politik yang dikemukakan oleh Max Weber yang mengungkapkan bahwa sebuah pemerintahan membutuhkan pengakuan dan dukungan dari masyarakat agar kekuasaannya dapat bertahan(Weber, 1978). Dalam konteks Orde Baru, legitimasi tersebut diperoleh melalui keberhasilan pembangunan yang dapat menunjukkan kemampuan negara dalam mengelola kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Selain pembangunan ekonomi, pemerintah Orde Baru juga berupaya memperoleh legitimasi melalui pengelolaan kehidupan keagamaan dan hukum Islam. Negara berusaha mengintegrasikan berbagai kepentingan keagamaan ke dalam kebijakan nasional sehingga dapat memperkuat penerimaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi politik Orde Baru tidak hanya dibangun melalui pembangunan ekonomi, tetapi juga melalui pengaturan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat (Alidar, 2012).

Transformasi Legitimasi Politik pada Era Reformasi

Berakhirnya era Orde Baru pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam sistem politik di Indonesia. Reformasi menyediakan kesempatan untuk demokrasi yang lebih terbuka lewat kebebasan media, pemilihan umum yang lebih bersaing, dan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam politik. Walaupun demikian, penelitian menunjukkan bahwa pembangunan tetap menjadi sumber utama legitimasi politik bagi pemerintah setelah Reformasi (Sofia et al., 2024).

Perbedaan yang paling mencolok ada pada cara legitimasi diperoleh. Di masa Orde Baru, legitimasi lebih banyak dibangun lewat stabilitas politik dan kontrol negara atas ruang publik. Sementara pada era Reformasi, legitimasi didapatkan dari penilaian masyarakat mengenai kinerja pemerintah. Dalam sistem demokrasi, keberhasilan pembangunan diakui sebagai salah satu indikator oleh masyarakat untuk mengevaluasi efektivitas pemerintahan(Yani, 2015).

Perubahan politik pasca-Reformasi juga diikuti oleh perubahan hubungan sipil dan militer. Jika pada masa Orde Baru militer menjadi salah satu pilar penting dalam menopang legitimasi kekuasaan, maka pada era Reformasi terjadi upaya profesionalisasi militer dan penguatan supremasi sipil dalam sistem demokrasi Indonesia (Djuyandi et al., 2025).

Beragam pemerintahan setelah Reformasi menunjukkan pola yang serupa dengan menjadikan pembangunan sebagai fokus utama. Proyek pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, pengurangan tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi terus menjadi komponen vital dalam agenda pemerintahan. Keberhasilan dari program-program tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menarik dukungan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Keberlanjutan Paradigma Pembangunan pada Indonesia Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesinambungan dalam paradigma pembangunan dari era Orde Baru hingga saat ini. Pembangunan terus dianggap sebagai indikator keberhasilan pemerintah serta alat penting untuk memperoleh legitimasi politik. Narasi pembangunan sering kali muncul dalam kampanye politik, pidato resmi, dan komunikasi publik pemerintah (Mahpudin, 2021).

Namun, terjadi perubahan dalam pemanfaatan pembangunan sebagai sumber legitimasi politik. Pada era Orde Baru, pembangunan cenderung disampaikan secara unilateral melalui media yang dikuasai oleh negara. Sebaliknya, di zaman kontemporer, pembangunan disampaikan melalui berbagai saluran media yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik secara langsung. Ini menandakan bahwa legitimasi politik pada masa demokrasi lebih tergantung pada penerimaan masyarakat dibandingkan sekadar keberhasilan pembangunan yang diumumkan oleh pemerintah.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem politik telah berubah dari otoritarianisme ke demokrasi, pembangunan tetap merupakan alat yang efektif untuk membangun legitimasi politik. Dengan demikian, paradigma pembangunan yang ada pada masa Orde Baru tidak sepenuhnya hilang, melainkan mengalami adaptasi merespons perubahan dalam sistem politik Indonesia.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan memiliki aspek politik yang tak terpisahkan dari proses pemerintahan. Temuan ini memperkaya kajian sejarah politik Indonesia dengan menunjukkan bahwa pembangunan bukan semata-mata kebijakan ekonomi, melainkan juga merupakan cara untuk membangun legitimasi politik. Selain itu, penelitian ini memperjelas bahwa keberhasilan pembangunan sering menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, baik di masa Orde Baru maupun di era Reformasi.

Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini karena hanya menggunakan metode studi literatur tanpa melibatkan pengumpulan data langsung. Selain itu, penelitian lebih terfokus pada tingkat nasional sehingga belum membahas variasi dalam pemanfaatan pembangunan sebagai sumber legitimasi politik di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang dapat menggunakan wawancara, studi kasus, atau analisis media untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara pembangunan dan legitimasi politik di Indonesia.

KESIMPULAN

Studi ini mengungkapkan bahwa pembangunan merupakan salah satu sumber utama yang mendasari legitimasi politik pemerintah Indonesia, yang berlanjut dari era Orde Baru hingga saat ini. Pada masa Orde Baru, pembangunan dimanfaatkan sebagai alat strategis untuk mendapatkan dukungan publik dan memperkuat stabilitas politik melalui kebijakan Trilogi Pembangunan serta program Repelita. Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian, membangun infrastruktur, serta meningkatkan hasil pertanian menjadi landasan bagi terbentuknya legitimasi politik bagi pemerintahan yang sedang berkuasa.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi perubahan sistem politik di Indonesia dari rezim otoriter ke sistem demokrasi pasca-Reformasi, pembangunan tetap berfungsi sebagai alat penting dalam memperoleh legitimasi politik. Perbedaannya terletak pada cara dan metode penyampaian kepada masyarakat. Pada masa Orde Baru, pembangunan digunakan untuk memperkuat stabilitas politik dan kekuasaan negara, sedangkan pada era Reformasi dan saat ini, pembangunan lebih difokuskan sebagai indikator kinerja pemerintah yang dimanfaatkan untuk menjalin kepercayaan dan dukungan masyarakat melalui proses demokratis.

Temuan dari penelitian ini memberikan sumbangsih untuk kajian sejarah politik di Indonesia dengan menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya memiliki dampak ekonomi dan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen politik dalam membangun legitimasi pemerintah. Selain itu, studi ini menunjukkan adanya kesinambungan paradigma pembangunan dari era Orde Baru hingga sekarang, meskipun bentuk serta strategi pelaksanaannya mengalami penyesuaian berdasarkan perkembangan sistem politik di Indonesia.

Dengan hasil tersebut, disarankan untuk studi lanjutan mengkaji lebih mendalam bagaimana pembangunan digunakan sebagai sumber legitimasi politik di tingkat daerah atau pada pemerintahan tertentu. Selain itu, penerapan metode penelitian lapangan, termasuk wawancara, observasi, dan analisis media, dapat membantu mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pembangunan, komunikasi politik, dan legitimasi pemerintah dalam konteks Indonesia kontemporer.

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian sejarah politik Indonesia dengan menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi dan sosial, tetapi juga sebagai sumber legitimasi politik yang mengalami kesinambungan dari era Orde Baru hingga Indonesia kontemporer. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai hubungan antara pembangunan, kekuasaan, dan legitimasi politik dalam konteks perubahan sistem politik Indonesia.

Kedua, secara metodologis, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan studi literatur dapat digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara kebijakan pembangunan dan legitimasi politik dalam perspektif sejarah. Melalui analisis berbagai sumber sejarah, jurnal ilmiah, dan dokumen pemerintahan, penelitian ini mampu menggambarkan pola keberlanjutan paradigma pembangunan dalam rentang waktu yang panjang.

Ketiga, secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman kepada pemerintah, akademisi, dan masyarakat bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian ekonomi, tetapi juga memiliki dampak terhadap pembentukan kepercayaan publik dan legitimasi politik. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat di era demokrasi.

DAFTAR REFERENSI

Alidar, E. M. K. (2012). Hukum Islam di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966–1997). *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, *1*(2). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1429

Aman. (2015). *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945–1998*. Ombak.

Djuyandi, Y., Dewi, S. K., Rahayu, L. F., & Hassan, M. S. (2025). Civil-Military Relations in Indonesia: Promoting a Professional Military Character from the New Order Era to the Reform Era. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *15*(3). https://doi.org/10.26618/ojip.v15i3.18714

Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers.

Hadiz, V. R. (2018). *Indonesia Beyond Reformasi: Necessity and the Challenge of Democratic Transition*. ISEAS Publishing.

Heryanto, A. (2019). *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Hot Raja, G. H., & Ekayanta, F. B. (2025). Politik Pembangunan Jalan Raya di Kawasan Liang Melas Datas, Kabupaten Karo Tahun 2022–2023. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, *4*(1). https://doi.org/10.32734/ljsp.v4i1.20390

Mahpudin. (2021). Kebangkitan Politik Identitas dalam Proses Demokratisasi di Indonesia Pasca Orde Baru. *Sospol*, *7*(2), 253–267. https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10781

Mayrudin, Y. M. (2018). Menelisik Program Pembangunan Nasional di Era Pemerintahan Soeharto. *Journal of Government*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Editio). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Rahmawati, R. (2022). Repelita: Sejarah Pembangunan Nasional di Era Orde Baru. *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesejarahan*, *9*(2), 36–49. https://doi.org/10.33387/etnohistori.v9i2.5654

Rajab, B. (2022). Otoritarianisme-Birokratik Orde Baru, Krisis Ekonomi dan Politik, dan Demokrasi Formal Masa Reformasi. *Jurnal Politik Indonesia*, *8*(1), 59–78. https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.21817

Ricklefs, M. C. (2021). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Serambi.

Robison, R., & Hadiz, V. R. (2017). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. Routledge.

Sofia, D., Fernandes, R., & Suryanef. (2024). Mengenal Lika-Liku Politik Indonesia dari Orde Lama ke Masa Reformasi. *Jurnal Kajian Sosial Dan Humaniora*, *1*(4). https://doi.org/10.63082/jksh.v1i4.27

Subari, S., & Hidayati, S. W. (2023). Sipil dan Militer: Legitimasi Kekuasaan dalam Pusaran Demokratisasi di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966–1998). *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *6*(6), 4347–4357. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i6.2263

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.

Yani, A. A. (2015). The Dynamic of Indonesian Political Trust in the Beginning of Reform Era. *Jurnal Penelitian Politik*, *12*(1). https://doi.org/10.14203/jpp.v12i1.527